

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, DAN DESENTRALISASI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pasaman)

Oleh:

Nur Atika Aini

Pembimbing : Taufeni Taufik dan Eka Haryani

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: nuratikaaini160593@gmail.com

*The Effect Of Clarity Budget Targets, Internal Control Systems, And
Decentralization to Performance Of Local Government
(Empirical Study On the Government Pasaman District SKPD)*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of empirical evidence budget goal clarity, internal control system and decentralization the performance of local government officials Pasaman regency. This research was conducted by using a survey of local work unit Pasaman. The population in this study is 31 working units Pasaman. Samples taken amounted to 93 respondents. The type of data used are primary data with data collection method using a questionnaire. Data analysis method used in this study. The results showed that the Budget Targets Clarity significant effect on the performance of local governments with a regression coefficient of 0.748 with 0.001 significance (alpha 0.05), Internal Control System have a significant effect on the performance of local governments with a regression coefficient of 0.182 with 0.000 significance (alpha 0.05), Decentralization significantly affect the performance of local governments with a regression coefficient of 0.351 with 0.000 significance (alpha 0.05). With a total number of (Adjusted R²) square value of 0.450, which means by 45.0%. While the remaining 55.0% influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study as organizational commitment, participation budgeting and others.

Keywords : Performance, governments, budget, internal control systems, and decentralization

PENDAHULUAN

Perubahan aspek reformasi yang paling dominan adalah pada aspek pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan

masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin

tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif/tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2011), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran juga tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Sehingga dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja.

Sistem pengendalian intern pada pemerintah sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintahan yang baik. Sesuai mandat PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa pemerintah telah

mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas (Arens, dkk 2008). Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 menyatakan bahwa apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya desentralisasi, organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, bisa menangani peristiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Pasaman TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun sebelumnya. Ditemukan permasalahan terhadap (1) Lemahnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan belum terbangun keselarasan antara dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dengan dokumen SAKIP SKPD. Ketidakselarasan ini terkait kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja, sehingga perencanaan kinerja tidak berbasis pada indikator kinerja utama

berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD; (2) Terbatasnya ketersediaan data kinerja, hal ini dikarenakan setiap SKPD Pola pengumpulan data kinerja yang dilakukan saat ini masih parsial. Lemahnya pengelolaan data kinerja memicu penggunaan/perumusan indikator kinerja kurang tepat dan terbatas, sehingga indikator kinerja kurang menggambarkan pencapaian kinerja yang sesungguhnya. Kondisi ini antara lain disebabkan lemahnya kompetensi aparatur dan belum adanya koordinasi yang baik antar unit kerja dalam mengelola data kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap daerah tentunya berbeda, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, juga pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang pada umumnya masih belum tertib. Hal ini tampak dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mendapati opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman belum bisa dikatakan baik. Jadi saya merasa perlu melakukan penelitian di kabupaten Pasaman.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Pratiwy Suwandi (2013) dengan judul yang sama dan menambahkan satu variabel yaitu sistem pengendalian intern namun lokasi penelitian yang berbeda. Penulis tertarik melakukan penelitian

ini di Kabupaten Pasaman dikarenakan belum ada ditemukan penelitian yang sama untuk daerah Kabupaten Pasaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sejauh mana kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, dan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kabupaten Pasaman)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kabupaten Pasaman)

TELAAH PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkatan pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negative kebijakan operasional yang telah diambil.

Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui 7 indikator, yaitu :

1. Perencanaan
2. Investigasi
3. Pengkoordinasian

4. Evaluasi
5. Pengawasan
6. Pemilihan staff
7. Negosiasi
8. Perwakilan
9. Kinerja secara menyeluruh

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dihendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Kejelasan Sasaran Anggaran diukur melalui 3 indikator, yaitu :

1. Spesifik sasaran anggaran
2. Sasaran tidak jelas
3. Pemahaman anggaran

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern diukur melalui 5 indikator, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Desentralisasi

Desentralisasi dapat diartikan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat (Miah dan Mia, 1996 dalam Karyanti 2010). Menurut Mardiasmo (2002) desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih luas tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, bisa menangani peristiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik.

Desentralisasi diukur melalui 5 indikator, yaitu :

1. Wewenang menentukan jumlah anggaran

2. Wewenang menentukan program dan kegiatan
3. Wewenang menentukan keterlibatan pegawai
4. Wewenang menentukan skala prioritas
5. Wewenang menentukan penambahan dan pemutasian pegawai

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran pada kinerja pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab yang melaksanakannya.

Penelitian menurut Syafril (2009) dalam pratiwy (2013), menunjukkan bahwa variabel Kejelasan sasaran Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, sehingga semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah SKPD

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Keberhasilan suatu sistem pengendalian ditentukan oleh seberapa jauh sesuai dengan karakteristik organisasi. Pendekatan kontijensi menunjukkan bahwa sistem pengendalian akan lebih dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi apabila desainnya sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, serta dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan dengan Sistem Pengendalian Intern yang efektif akan berpengaruh terhadap Kinerja SKPD. Penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah pernah diteliti oleh Afrida (2013) yang menghasilkan bahwa sistem pengendalian intern

pemerintah berpengaruh terhadap kinerja.

H2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Desentralisasi akan meningkatkan Kinerja jika pendelegasian wewenang diberikan manajemen puncak ke manajemen bawah dalam pengambilan keputusan/kebijakan, hal ini akan memberikan semangat kepada unit organisasi lebih rendah untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya sehingga memacu untuk meningkatkan kinerja SKPD.

Penelitian dari Andarias Bangun(2009) menunjukkan variabel Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan struktur yang lebih terdesentralisasi akan meningkatkan kinerja yang semakin baik.

H3 : Desentralisasi Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman, yang berjumlah 31 SKPD. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah kasubag keuangan, bendahara dan staf keuangan yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Pasaman. Sehingga responden keseluruhan berjumlah 93 orang.

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer, yaitu kuisioner. Kuisioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuisioner terdiri dari 93 buah akan dibagikan kepada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Masing-masing SKPD mendapat 3 buah kuisioner yang ditujukan kepada kasubag keuangan, bendahara dan staf keuangan yang ada di SKPD Kab. Pasaman.

Satistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik dimana dengan menggunakan skala pengukuran ordinal. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

Pengujian Data

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas alat ukur *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh di analisis dengan

teknik tertentu (Siregar, 2013). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Alpha Cronbach (a)*. *Alpha Cronbach* digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat atau variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2009:95). Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolinearitas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2009:125).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2005). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Menurut Purwanto (2008) regresi berganda adalah banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis pertama kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam menggunakan koefisien korelasi yang dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara

0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 87).

Pengujian Hipotesis

Hipotesis satu, dua, tiga akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern dan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5%. Kriterianya adalah apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan sebaliknya apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Pasaman dalam usia lebih setengah abad telah dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yakni Kabupaten Pasaman (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Pasaman Barat (Kabupaten Pemekaran) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003. Kabupaten Pasaman beribu kota di Lubuk Sikaping secara geografis terletak antara 0o55 LU-0o06 LS dan antara 99o45 BT-100o21 BT, luas wilayahnya adalah 3.947,63 Km².

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variable-variabel penelitian seperti kinerja pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern dan desentralisasi. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Pemerintah Daerah	79	22.00	41.00	32.9494	4.10721
Kejelasan Sasaran Anggaran	79	8.00	15.00	12.1519	1.60997
Sistem Pengendalian Intern	79	60.00	103.00	83.7848	7.84247
Desentralisasi	79	6.00	26.00	16.0000	4.65475

Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

Dari tabel 1 untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 41,00 dan minimum 22,00 kemudian nilai rata-rata untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah adalah 32,9494 dengan standar deviasi sebesar 4,10721. Untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai maksimum sebesar 15,00 dan minimum 8,00 kemudian nilai rata-rata adalah 12,1519 dengan standar deviasi 1,60997. Untuk variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai maksimum sebesar 103,00 dan minimum 60,00 kemudian nilai rata-rata adalah 83,7848 dengan standar deviasi sebesar 7,84247. Dan untuk variabel Desentralisasi memiliki nilai maksimum sebesar 26,00 dan

minimum 6,00 kemudian nilai rata-rata adalah 16,0000 dengan standar deviasi sebesar 4,65475.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Semua nilai *r* hitung untuk masing-masing pernyataan tentang penyajian kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, desentralisasi dan kinerja pemerintah lebih besar dari *r* table (0,221). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid karena *pearsoon correlation* lebih besar dari *R table*.

Hasil Uji Realibilitas

Dari semua nilai keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan SPSS 17.0, terlihat data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

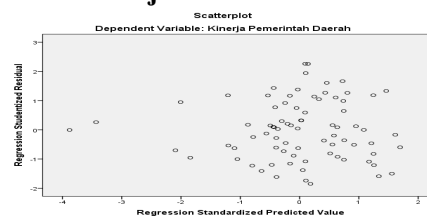
Hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel independennya memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Gambar 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS (2015)

Berdasarkan gambar diatas dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Hasil uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi, diperoleh angka DW sebesar 1,787, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka DW berada diantara -2 sampai +2.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 3,029 + 0,748X_1 + 0,182X_2 + 0,351X_3$$

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai t_{hitung} senilai (3,432) dan signifikansi (0,001). Sedangkan t_{tabel} dieperoleh dengan persamaan $n - k - 1: \alpha / 2 = 79 - 3 - 1: 0,05 / 2 = 75 : 0,025 = 1,992$. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 3,432 > 1,992$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$. Yang berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi dependen. Hasil ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pada pemerintah daerah Kab. Pasaman. Karena semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari Kusumaningrum (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja, ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak sejalan dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah (2013) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh pada kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja, ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak menjamin meningkatnya kinerja aparat Pemda Aceh.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai t_{hitung} senilai (3,961) dan signifikansi (0,000). Sedangkan t_{tabel} dieperoleh dengan persamaan $n - k - 1: \alpha / 2 = 79 - 3 - 1: 0,05 / 2 = 75 : 0,025 = 1,992$. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 3,961 > 1,992$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Yang berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi dependen. Hasil ini menyimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Ini berarti bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kinerja pemerintah daerah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula kinerja pada pemerintahan itu sendiri.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramandei (2009) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan hasil yang ditemukan Bobby kurniawan (2006) bahwa variabel pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai t_{hitung} senilai (4,620) dan signifikansi (0,000). Sedangkan t_{tabel} dieperoleh dengan persamaan $n - k - 1$: $\alpha / 2 = 79 - 3 - 1$: $0,05 / 2 = 75$: $0,025 = 1,992$. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,620 > 1,992$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Yang berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi dependen. Hasil ini menyimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Pengaruh antara desentralisasi dengan kinerja pemerintah daerah adalah bahwa semakin baik desentralisasi maka kinerja pemerintah juga akan tercapai.

Hal ini sejalan dengan teori Hill (1998) dalam Oktaviani (2003) bahwa desentralisasi mendorong peningkatan kinerja diorganisasi yang kompleks. Dengan lingkungan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, organisasi sektor publik dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait dengan tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Adanya desentralisasi dalam wujud pelimpahan wewenang ini akan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Indudewi (2009) menemukan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,450 yang menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pasaman

dipengaruhi oleh variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern dan Desentralisasi sebesar 45,0% dan sisanya 55,0% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti variabel Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan lain-lain.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Di mana semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik pula kualitas kinerja.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula kinerja pada SKPD Kabupaten Pasaman.
3. Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dimana semakin baik desentralisasi pemerintah maka akan semakin baik pula kualitas kinerja pada SKPD Kabupaten Pasaman.
4. Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,450 hal ini menunjukkan bahwa 45,0% kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern dan desentralisasi. Sedangkan untuk sisanya sebesar 55,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti variabel

Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan lain-lain.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu Kabupaten. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pemerintah daerah.
2. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang dapat digunakan hanya 84,94% dari seluruh kuesioner yang disebarkan (100%). Hal ini disebabkan banyaknya responden yang tidak terlalu peduli terhadap pengisian kuesioner karena kesibukan dan keterbatasan waktu yang mereka miliki sehingga beberapa kuesioner ada yang hilang bahkan tidak diisi.
3. Peneliti tidak mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner karena keterbatasan waktu sehingga responden tidak bisa menanyakan langsung terhadap pertanyaan yang tidak dimengerti.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Misalnya variabel Komitmen Organisasi dan lain-lain.
4. Berpengaruhnya semua variabel bisa menjadi rujukan dan masukan bagi SKPD Kabupaten Pasaman untuk mengevaluasi kejelasan sasaran anggaran yang digunakan pada setiap SKPD, Sistem Pengendalian Intern yang baik dan Desentralisasi yang di wujudkan. Maka diharapkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman akan mengalami peningkatan yang semakin baik serta dapat meningkatkan Kinerja dalam mewujudkan visi dan misi di Kabupaten Pasaman.

Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa Kabupaten bahkan se-Provinsi. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian

kuesioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarias, Bangun. 2009. "*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai variabel Pemoderasi*". Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Afrida, Nur. 2013. "*Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja*

- Manajerial SKPD*".
Universitas Negeri Padang.
- Arens, dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. 2006. *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Earlangga.
- Budi, Astuti. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Pimpinan Dalam Pelaksanaan Program di SKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variaebel Pemoderasi". Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indudewi, Dian. 2009. "Pengaruh Sararan Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi, dan Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada SKPD dan BUMD Kota Semarang)". Tesis. Universitas Diponegoro.
- Kenis, Izzetin. 2012. *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review. Vol. LIV No.4.October.pp. 707-721
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah". Tesis. Universitas Diponegoro.
- Mulyadi dan Setyawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhalimah. (2013). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh*. Aceh Darussalam.
- Ramandai, Pilipus. 2010. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah*. Jurnal Maksi, volume 10:55-73.
- Solikin, Akhmad. (2005). *Accountability Reporting in Indonesia: When Self-serving Attributions Exaggerate Perceived Performance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei
- Suwandi, Annisa Pratiwy. 2013. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". Universitas Negeri Padang.

- Syafrial, 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis.* Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (diakses pada 29 September 2014)
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah
- Www.COSO Internal Control Framework Resources, 2008